

SEJARAH KERAJAAN SEBA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA ALEXANDER RIHI JAWA PADA TAHUN 1890-1901

Marjonis Septian Mangngi Naga^{1*}, Flafius Selfianus Rato², Silvanus Jefrino Mali³

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

*Corresponding email: marjonismangngi944@gmail.com

Abstrak: Kajian sejarah lokal tentang kerajaan di Pulau Sabu masih terbatas, termasuk masa pemerintahan Raja Alexander Rihi Jawa di Kerajaan Seba yang banyak tersimpan dalam tradisi lisan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sejarah Seba sebelum 1890, pengangkatan Alexander Rihi Jawa, dan kebijakan pemerintahannya pada 1890–1901. Metode sejarah dengan pendekatan kualitatif digunakan di bekas wilayah Kerajaan Seba yang berpusat di Mebba, Sabu Barat. Tiga informan dipilih secara purposif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil menunjukkan bahwa Seba semula bernama Habba dan menjadi kerajaan setelah Kore Rohi dikukuhkan sebagai raja. Pengangkatan Alexander bertumpu pada garis keturunan dan upacara adat, sedangkan keterangan informan menyebut keterlibatan Belanda dalam penetapannya sebagai Raja Sabu. Kebijakannya menekankan stabilitas, penyelesaian sengketa, dan pelestarian lembaga adat, sementara ekonomi tetap agraris. Kepemimpinannya menjaga eksistensi Seba di tengah menguatnya pengaruh kolonial.

Kata kunci: Sejarah, Kerajaan Seba, Alexander Rihi Jawa, Pemerintahan Tradisional, Pulau Sabu

Abstract: Local historical studies on the kingdoms of Sabu Island remain limited, including the reign of Alexander Rihi Jawa in the Seba Kingdom. This study describes the history of Seba before 1890, the installation of Alexander Rihi Jawa, and his government policies in 1890–1901. The historical method with a qualitative approach was applied in the former Seba territory centered in Mebba, West Sabu. Three informants were selected purposively, data were collected through interviews, observation, and document study, then analyzed through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings show that Seba was originally called Habba and became a kingdom after Kore Rohi was installed as king. Alexander's installation rested on lineage and customary ceremony, while informants indicate Dutch involvement in his designation as King of Sabu. His policies emphasized stability, dispute mediation, and preservation of customary institutions, while the economy remained agrarian. His leadership sustained Seba amid growing colonial influence.

Keywords: History, Seba Kingdom, King Alexander Rihi Jawa, Traditional Government, Sabu Island

PENDAHULUAN

Sejarah lokal menempati kedudukan penting dalam disiplin ilmu sejarah di Indonesia. Sejarah nasional cenderung menyoroti peristiwa besar yang berpusat pada tokoh dan kekuasaan tingkat nasional, sedangkan sejarah lokal membuka ruang bagi narasi daerah yang selama ini jarang tersorot. Dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dapat diungkap melalui kajian semacam itu, sehingga perjalanan bangsa tampak sebagai mosaik berbagai pengalaman daerah. Sejarah lokal juga turut membentuk identitas budaya karena proses historis yang dikisahkannya dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Pandangan ini sejalan dengan Kartodirdjo (1993) yang memahami sejarah sebagai pengalaman kolektif masa lampau dengan unsur waktu, pelaku, proses, dan ruang.

Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara Timur pada mulanya dibentuk sebagai benteng pertahanan masyarakat setempat. Sebelum bangsa Eropa datang, penduduk hidup teratur dalam sistem kekeluargaan berbasis suku, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan berdaulat dan bebas dari campur tangan asing (Widiyatmika, 2007). Medan yang gersang dan bergunung-gunung ikut membentuk watak sosial serta identitas masyarakatnya. Kepulauan Sabu termasuk wilayah yang kaya sejarah lokal, dan salah satu pusat kekuasaan tradisional yang berpengaruh

di sana adalah Kerajaan Seba. Kerajaan ini tumbuh dari penyatuan komunitas adat yang semula hidup mandiri, lalu membentuk pemerintahan tradisional di bawah seorang raja. Hubungan dagang dan interaksi dengan kekuatan luar, termasuk bangsa Eropa, turut mewarnai perkembangannya.

Seba tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai pusat pengaturan adat, budaya, dan kehidupan sosial. Lima belas raja tercatat memerintah kerajaan ini, mulai dari Kore Rohi hingga Paulus Charles Jawa. Alexander Rihi Jawa menempati urutan kedua belas dan memerintah pada 1890–1901, masa ketika nilai-nilai adat harus dipertahankan di tengah perubahan yang dibawa kolonialisme.

Studi terdahulu tentang Seba masih terpusat pada periode lain. Higa (2023) meneliti masa Raja Lazarus Rohi (1881–1890) dan menemukan bahwa Seba memiliki wilayah kekuasaan terluas di Kabupaten Sabu Raijua, mencakup 18 wilayah ketemukungan, dengan sistem pemerintahan yang bertahan hingga 1963. Nara Kaha (2024) mengkaji masa Raja Paulus Charles Jawa (1937–1963) dan memaparkan struktur pemerintahan yang terdiri atas raja, fetor, dan temukung, sistem kekerabatan patrilineal, serta hubungan baik dengan Belanda. Tabala (2023) menelaah Kerajaan Anas pada masa Raja Leu Nesnay I (1879–1908) dari sisi politik, sosial, dan ekonomi, sehingga menjadi pembanding bagi kajian pemerintahan seorang raja. Masa Alexander Rihi Jawa berada di antara dua periode Seba yang telah dikaji tersebut, tetapi belum memperoleh kajian tersendiri.

Informasi tentang masa pemerintahan Alexander Rihi Jawa sebagian besar masih bersumber dari tradisi lisan, cerita masyarakat, dan arsip lokal yang belum banyak diteliti secara akademik. Akibatnya, pemahaman generasi muda Sabu, bahkan masyarakat sekitar yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Seba, kian menipis. Tiga persoalan yang saling berkaitan menjadi pertanyaan penelitian: bagaimana sejarah Kerajaan Seba sebelum 1890, bagaimana Alexander Rihi Jawa diangkat sebagai raja, dan bagaimana kebijakan pemerintahannya pada 1890–1901. Hasilnya bermanfaat bagi pengayaan historiografi lokal, bahan rujukan peneliti dan mahasiswa, sumber pembelajaran sejarah lokal, serta dorongan pelestarian peninggalan Seba.

Artikel ini berfokus pada tiga persoalan tersebut dan membahasnya dengan kerangka teori pemerintahan dan kepemimpinan yang dipaparkan pada landasan teori. Argumen yang diajukan ialah bahwa kepemimpinan Alexander Rihi Jawa ditopang dua tiang legitimasi, yaitu garis keturunan yang dikukuhkan secara adat dan pengakuan pemerintah kolonial, serta bahwa kebijakannya lebih menekankan stabilitas, penyelesaian sengketa, dan pelestarian lembaga adat daripada pembangunan fisik berskala besar. Kesimpulan awal ini diuji melalui data wawancara, observasi, dan studi dokumen pada bagian berikut.

LANDASAN TEORI

Kajian konseptual tentang kerajaan, pemerintahan, dan kepemimpinan memberi kerangka untuk membaca periode ini. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa kerajaan lokal berpusat pada klen dan suku, lalu berkembang menjadi daerah swapraja pada masa Hindia Belanda dengan dukungan kepala suku besar dan kecil. Kansil (2008) menekankan bahwa kerajaan, luas maupun sempit, harus memenuhi syarat wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Woha (2008) membedakan kerajaan berorientasi perdagangan yang terbuka terhadap pengaruh luar dari kerajaan pedalaman yang bergantung pada pajak rakyat. Pada tataran pemerintahan, Busroh (1989) memandangnya sebagai tatanan lembaga yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan negara atau kerajaan, sedangkan Doko (1973) menegaskan bahwa pemerintahan tradisional bertumpu pada adat dengan raja sebagai penguasa tertinggi.

Pandangan tentang sumber otoritas raja tidak seragam. Doko (1973) menempatkan raja sebagai penguasa tunggal di wilayahnya, sedangkan Effendy (1981) dan Soekanto (2013) menekankan bahwa kepemimpinan lahir dari kesediaan pengikut untuk dipengaruhi. Weber (1947) menawarkan titik temu melalui konsep legitimasi tradisional, yakni kekuasaan yang

diterima karena didasarkan pada adat yang berlaku sejak lama, sementara Tamburaka (1999) menguraikan karisma sebagai sifat yang dianggap melekat pada pemimpin sebagai warisan leluhur. Perbedaan penekanan ini penting, sebab menentukan apakah pengangkatan seorang raja dibaca sebagai hak turun-temurun atau sebagai hasil pengakuan sosial.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Suprpto (2013) memandang penelitian sejarah sebagai cara mengkaji peristiwa dan fakta masa lampau, sedangkan Koentjaraningrat (2009) menekankan rekonstruksi masa lampau yang sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis bukti. Lokasi penelitian mencakup seluruh bekas wilayah Kerajaan Seba dengan pusat di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Mebba dipilih karena merupakan ibu kota kerajaan dan menyimpan peninggalan berupa istana raja serta benda pusaka, sehingga memudahkan pengumpulan data.

Subjek Penelitian dan Sumber Data

Informan ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka paling mengetahui permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2012). Mereka berasal dari keturunan Raja Alexander Rihi Jawa, keturunan mantan pejabat Kerajaan Seba, dan orang yang dianggap paling memahami sejarah Seba. Kriteria yang digunakan ialah bersedia memberi keterangan secara jujur, sehat jasmani, dan berusia 60 tahun ke atas. Tiga informan memenuhi kriteria tersebut: Marthen Heke Ludji (78 tahun, keluarga raja), Ruben Wila Pa (61 tahun, tokoh adat), dan Bernadus Udju Deda (86 tahun, tokoh masyarakat). Sumber data terbagi menjadi sumber primer, yakni wawancara, observasi langsung, dokumen sezaman, dan benda bersejarah, serta sumber sekunder berupa buku dan literatur yang relevan (Basri, 2006).

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara bersifat terbuka dalam suasana kekeluargaan dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan (Esterberg, dalam Sugiyono, 2015). Pedoman itu memuat tiga kelompok pertanyaan, yaitu sejarah Seba sebelum 1890, proses pengangkatan Alexander Rihi Jawa, dan kebijakan pemerintahannya. Observasi dilakukan langsung terhadap bekas istana, silsilah raja, makam Raja Alexander Rihi Jawa, serta peninggalan lain seperti tongkat dan alat perang (Margono, 2009), dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk foto. Studi dokumen menelaah buku sejarah, silsilah raja, dan inventaris Arsip Timor yang disusun Lohanda (1998) untuk mendukung atau memperkuat kepercayaan terhadap suatu peristiwa (Satori, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis mengikuti empat tahap metode sejarah menurut Hamid dan Madjid (2014): heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan menghimpun sumber lisan, tertulis, dan benda. Kritik sumber mencakup kritik eksternal untuk menilai keaslian sumber dan kritik internal untuk menilai kredibilitas isinya, termasuk pada tongkat raja dan perkakas peninggalan Seba. Interpretasi menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam relasi sebab akibat secara cermat dan objektif. Historiografi disusun secara deskriptif naratif dan kronologis (Daliman, 2012). Keterangan informan yang berbeda tidak dilebur menjadi satu versi, melainkan dipertahankan sebagai temuan masing-masing dan dibandingkan dengan konteks arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Kelurahan Mebba terletak di pesisir utara Pulau Sabu pada ketinggian 0–20 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 2,11 km², berbatasan dengan Laut Sabu di utara serta Desa Ledean, Raemadia, dan Raeloro. Seluruh bekas wilayah Kerajaan Seba seluas 185,16 km². Iklimnya tergolong kering, dengan bulan kering delapan hingga sembilan bulan per tahun dan topografi berbukit yang ditumbuhi kelapa, lontar, beringin, dan jati. Pada 2026 Kelurahan Mebba berpenduduk 2.596 jiwa; sebanyak 59,01% bekerja sebagai petani, dan 81,90% beragama Kristen Protestan, disusul Islam (13,87%) dan Katolik (4,24%). Penulis skripsi mengaitkan dominasi Kristen Protestan dengan pengaruh Belanda yang pernah menduduki Sabu.

Data kependudukan tersebut bersifat kontemporer dan dipakai sebagai konteks, bukan sebagai gambaran masa 1890–1901. Kondisi iklim kering dan lahan berbukit membantu menjelaskan mengapa pertanian lahan kering, peternakan, dan penyadapan lontar menjadi tumpuan hidup, pola yang selaras dengan gambaran ekonomi masa Alexander pada bagian Kebijakan Pemerintahan Raja Alexander Rihi Jawa.

Sejarah Kerajaan Seba sebelum Tahun 1890

Seba dikenal dengan nama Habba sebelum menjadi kerajaan. Menurut Marthen Heke Ludji, Habba merupakan satu dari enam wilayah utama Pulau Sabu, bersama Liae, Dimu atau Timu, Mehara atau Mesara, Menia, dan Raijua. Wilayah itu dikaitkan dengan Wai Waka dan diberikan kepada Dara Rai. Pada tahap awal, Habba belum berbentuk kerajaan dan dipimpin para pemuka adat yang mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga hubungan antarkelompok sesuai ketentuan leluhur. Perubahan terjadi ketika Kore Rohi, keturunan Dara Rai yang disebut keluarga raja sebagai keturunan ke-33 dari nenek moyang pertama di Seba, dikukuhkan sebagai raja oleh para pemimpin adat. Sejak saat itu Habba berkembang menjadi wilayah kerajaan yang dipimpin seorang raja. Tradisi yang diturunkan menempatkan pembentukan Seba pada sekitar 1600-an, sebelum Belanda tiba di Sabu sekitar 1653.

Silsilah yang disampaikan keluarga raja memuat dua belas nama hingga Alexander Rihi Jawa (Tabel 1). Beberapa raja hanya disertai satu tahun, dan terdapat jeda tahun yang tidak terisi antara Doko Lomi (1790–1794) dan Ama Lomi Jara (1830–1859), sehingga angka-angka tersebut paling aman dibaca sebagai petunjuk urutan, bukan batas masa pemerintahan yang pasti. Setelah Alexander, takhta dipegang Elias Ludji Raja Pono, Samuel Thomas Jawa, dan Paulus Charles Jawa.

Tabel 1. Urutan Raja Kerajaan Seba hingga Alexander Rihi Jawa

No	Raja	Tahun yang disebutkan
1	Kore Rohi	Tidak disebutkan
2	Jara Lomi	1694
3	Wadu Lay	1717
4	Jara Wadu	1747–1760
5	Ama Doko Lomi Jara	1770
6	Doko Lomi	1790–1794
7	Ama Lomi Jara	1830–1859
8	Ama Dima Talo	1859–1863
9	Ama Nia Jawa	1864–1868
10	Ama Doko Kaho	1868–1881
11	Lasarus Rosi Jawa	1882–1889
12	Alexander Rihi Jawa	1890–1901

Sumber: wawancara dengan keluarga raja dan dokumen silsilah raja.

Wilayah kekuasaan Seba juga tergolong luas. Informan menyebut 18 wilayah yang berkaitan dengan kerajaan, antara lain Raedewa, Ledean, Teriwu, Raenalulu, Depe, Raemude, Mebba, dan Roboaba. Mebba menjadi pusat pemerintahan, dan bekas istana kerajaan yang masih dapat dikenali di sana menjadi bukti fisik keberadaannya.

Hubungan dengan pihak luar sudah terbentuk jauh sebelum 1890. Tradisi lisan menyebut Raja Lomi Jara, raja kedua, menandatangani perjanjian dengan Belanda pada sekitar 1700-an. Inventaris Arsip Timor (Lohanda, 1998) mencatat *Contract met de Timorsche Vorsten* yang ditandatangani J. A. Paravicini pada 9 Juni 1756, yaitu pembaruan perjanjian VOC dengan penguasa Timor, Rote, Sawu, Solor, dan Sumba. Arsip tersebut berfungsi sebagai konteks hubungan politik dan ekonomi regional, bukan pengganti keterangan lokal, sebab isinya bersifat umum dan tidak dapat langsung dipakai untuk menggambarkan praktik di Seba.

Gambaran kehidupan sebelum 1890 diperoleh terutama dari Ruben Wila Pa. Pulau Sabu terbagi ke dalam beberapa kerajaan dan wilayah adat yang berdiri mandiri dengan aturan adat serta pemerintahan tradisional bercorak feodal. Kekuasaan raja banyak bergantung pada kekuatan suku pendukungnya, antara lain Nataga, Namata, Nahoro, Nahubu, dan Kekoro. Konflik antarsuku dan antarkerajaan kerap terjadi, terutama mengenai batas wilayah adat dan penguasaan tanah, bahkan sampai peperangan. Ketegangan itu mulai mereda pada masa Alexander, antara lain melalui hubungan perkawinan antara keluarga kerajaan Seba dan kerajaan lain, khususnya Timu.

Perekonomian bertumpu pada pertanian dan peternakan, dengan perdagangan sistem barter. Garam, gula, kopra, ternak, dan hasil tani dipertukarkan, sedangkan pedagang luar memasok kain, benang, dan kebutuhan lain. Arsip Timor mencatat interaksi dagang antara Timor dan pedagang Bugis serta kesepakatan perdagangan kayu cendana dan budak dengan Inggris, Portugis, Prancis, dan Makassar (Lohanda, 1998). Catatan itu bersifat regional, tetapi menunjukkan bahwa ekonomi Seba yang agraris tidak sepenuhnya terisolasi dari jaringan dagang yang lebih luas. Di bidang sosial, adat menjadi pedoman pergaulan, penyelesaian masalah, dan pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan pertanian maupun pembangunan rumah adat, sementara pemimpin adat, kepala suku, dan raja mengelola kehidupan komunitas.

Observasi lapangan memperkuat keterangan lisan. Silsilah raja memperlihatkan pergantian kepemimpinan secara turun-temurun, bekas istana di Mebba menandai pusat pemerintahan, dan makam Alexander Rihi Jawa berbentuk segi empat dengan bangunan menyerupai kubah bulat di bagian atas, prasasti identitas di bagian depan, serta pilar di kanan dan kiri yang menunjukkan pengaruh bentuk bangunan kolonial. Ketiganya mengikat wawancara, observasi, dan dokumen dalam satu gambaran yang saling mendukung.

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Kartodirdjo (1993) bahwa sejarah merupakan proses yang melibatkan waktu, pelaku, dan ruang. Transformasi Habba menjadi Seba tidak terjadi mendadak. Perubahan itu menyerupai balai pertemuan kampung yang dari waktu ke waktu memperoleh seorang pemimpin tetap dan wilayah pengaruh yang makin luas. Kerajaan yang tumbuh dari klen dan suku itu sesuai dengan penjelasan Koentjaraningrat (2009), sedangkan luas wilayah dan kuatnya pemerintahan adat sejalan dengan temuan Higa (2023). Keterbukaan Seba terhadap diplomasi dan perdagangan lintas pulau, apabila ditafsirkan melalui tipologi Woha (2008), menunjukkan perpaduan antara basis agraris dan jejaring dagang, bukan pola kerajaan pedalaman yang sepenuhnya bergantung pada pajak rakyat.

Jawaban atas rumusan masalah pertama: sebelum 1890, Seba berkembang dari wilayah adat Habba menjadi kerajaan melalui pengukuhan Kore Rohi, dilanjutkan pergantian raja secara turun-temurun, dengan 18 wilayah, pusat di Mebba, kehidupan sosial yang berlandaskan adat, serta hubungan awal dengan Belanda.

Proses Pengangkatan Raja Alexander Rihi Jawa

Keluarga raja menggambarkan pengangkatan Alexander sebagai bagian dari suksesi turun-temurun yang mewariskan takhta kepada putra dari keluarga kerajaan, terutama anak

sulung. Marthen Heke Ludji menyebut Alexander sebagai putra Rihi Jawa atau Ama Kaho Rihi, yang menyerahkan pemerintahan karena usia lanjut. Upacara pengukuhan dipimpin tokoh adat dan pemuka kepercayaan adat yang dikenal sebagai Mone Ama, khususnya Deo Rai dan Pulodo Rai. Calon raja didudukkan di atas batu adat Lawa Rai sebagai simbol pengukuhan dan legitimasi, kemudian diarak warga dari Kampung Adat Namata menuju istana sambil menerima penghormatan melalui nyanyian adat. Setibanya di istana, ia didudukkan di kursi kerajaan sebagai tanda resmi memerintah.

Prosesi itu melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, fetor, temukung, kepala kampung, dan warga umum. Syarat calon raja ada tiga, yakni berasal dari garis keturunan kerajaan, telah dewasa, dan telah berumah tangga. Bila pewaris belum memenuhi syarat, kerabat atau tokoh yang ditunjuk menjalankan pemerintahan sementara. Hari pelaksanaan ditentukan melalui musyawarah keluarga raja, tokoh adat, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender adat, lazimnya pada malam bulan purnama. Ritual berlangsung semalam suntuk di Namata, dan keesokan harinya arak-arakan dikawal pasukan berkuda menuju istana. Rumah Adat Namata karenanya menjadi bagian penting dari tradisi pengukuhan raja Seba.

Keterangan tokoh adat Ruben Wila Pa menambahkan dimensi lain, yaitu pengangkatan Alexander sebagai Raja Sabu, penguasa yang membawahi seluruh Pulau Sabu. Menurutnya, Belanda semula menjalin hubungan dengan Timu, tetapi beralih ke Seba karena sambutan di Timu dianggap kurang memuaskan. Di Seba, kedatangan Belanda disambut upacara adat, tarian Pedoa dan Ledo, serta jamuan yang melibatkan warga berbagai wilayah. Kesan baik itu membuat Alexander, yang sebelumnya Raja Seba, diangkat menjadi Raja Sabu dalam upacara di kawasan Raiburu yang kemudian dikenal sebagai Teni Hawu. Hadir para tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin wilayah, dan wakil pemerintah Belanda, dengan daun pisang kuning dibentangkan sebagai alas jalan menuju istana sebagai lambang kemuliaan. Sesudah peristiwa itu, raja-raja Timu, Liae, Mesara, dan Raijua berubah status menjadi fetor yang membantu Raja Sabu.

Bernadus Udju Deda memberikan versi yang lebih menekankan peran Belanda. Menurutnya, pengangkatan dilakukan oleh pihak Belanda yang disebut Wailada, yang menimbang kedekatan calon dengan keluarga raja atau Duae, dan berlangsung di Istana Tenai Hawu, tempat para pemimpin dan tokoh Sabu berkumpul. Ringkasan ketiga keterangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Keterangan Informan tentang Pengangkatan Alexander Rihi Jawa

Informan	Inti keterangan	Tempat dan pihak yang disebut
Marthen Heke Ludji (keluarga raja)	Suksesi turun-temurun kepada putra raja; upacara adat dengan Lawa Rai; arak-arakan ke istana; syarat keturunan, dewasa, dan berumah tangga	Kampung Adat Namata dan istana; Mone Ama (Deo Rai, Pulodo Rai), fetor, temukung, warga
Ruben Wila Pa (tokoh adat)	Diangkat sebagai Raja Sabu setelah Belanda berpindah dari Timu ke Seba; raja Timu, Liae, Mesara, dan Raijua menjadi fetor	Raiburu atau Teni Hawu; tokoh adat, pemimpin wilayah, wakil Belanda
Bernadus Udju Deda (tokoh masyarakat)	Pengangkatan ditentukan pihak Belanda dengan menimbang kedekatan dengan keluarga raja	Istana Tenai Hawu; Belanda (Wailada)

Sumber: hasil wawancara.

Ketiga keterangan dapat dibaca sebagai dua dimensi yang saling melengkapi. Keluarga raja menjelaskan pengukuhan Alexander sebagai Raja Seba melalui adat, sedangkan tokoh adat dan tokoh masyarakat menjelaskan penetapannya sebagai Raja Sabu yang melibatkan Belanda. Dimensi pertama menguatkan pandangan Doko (1973) bahwa pemerintahan tradisional dibangun di atas garis keturunan dan pengakuan masyarakat adat; pengakuan itu tampak pada musyawarah penentuan waktu, pelibatan fetor dan temukung, serta penghormatan warga dalam arak-arakan. Legitimasi demikian sesuai dengan konsep otoritas tradisional Weber (1947),

yaitu kekuasaan yang diterima karena adat yang dijalankan turun-temurun, dan dengan pandangan Effendy (1981) bahwa pemimpin ada karena ada pengikut yang bersedia mengikutinya. Syarat dewasa dan berumah tangga menunjukkan bahwa garis darah saja belum memadai, sebab kewibawaan dan kecakapan calon raja juga dituntut.

Keterlibatan Belanda menambah lapisan baru. Legitimasi Alexander tidak lagi bersumber pada adat semata, tetapi juga pada pengakuan penguasa kolonial, dan perubahan status raja-raja Timu, Liae, Mesara, serta Rajua menjadi fetor memperlihatkan bergesernya penataan politik Pulau Sabu. Ibarat bangunan yang disangga dua tiang, kedudukan Alexander berdiri di atas adat dan restu kolonial sekaligus. Karena bersumber dari tradisi lisan, perbedaan nama tempat dan pihak penentu tidak dipaksakan menjadi satu cerita tunggal. Penelitian ini belum memakai arsip kolonial yang secara khusus mencatat peristiwa tersebut, sehingga penanggalan yang pasti masih memerlukan penelitian lanjutan.

Jawaban atas rumusan masalah kedua: Alexander Rihi Jawa dikukuhkan melalui suksesi garis keturunan dan upacara adat yang melibatkan Mone Ama serta berbagai unsur masyarakat, sedangkan keterangan informan lain menempatkan Belanda sebagai pihak yang ikut menetapkannya sebagai Raja Sabu.

Kebijakan Pemerintahan Raja Alexander Rihi Jawa

Informan menggambarkan Alexander sebagai raja yang dicintai masyarakat, tegas, dan berkarisma. Dukungan itu disebut sebagai alasan ia memerintah cukup lama. Struktur pemerintahan tidak berubah dari masa raja-raja sebelumnya, dan perubahan selama 1890–1901 tidak terlalu besar. Kebijakannya dapat dikelompokkan menjadi bidang politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, serta sosial.

Struktur pemerintahan terdiri atas empat jenjang (Tabel 3). Bernadus Udju Deda menambahkan wakil temukung atau kepala kampung pada jenjang terbawah. Jalur ini sekaligus menjadi saluran pemungutan pajak: Belanda memungut pajak melalui raja, raja meneruskannya kepada fetor, kemudian temukung dan masyarakat, dan kesalahan dalam menunaikan kewajiban dapat dihukum pemerintah kolonial. Keterangan tersebut menandakan bahwa pemerintahan Seba tidak dapat dilepaskan dari pengawasan Belanda, meskipun hubungan keduanya disebut berjalan cukup baik.

Tabel 3. Struktur Pemerintahan Kerajaan Seba pada Masa Alexander Rihi Jawa

Jabatan	Sebutan lokal	Fungsi
Raja	Duae	Pemegang kekuasaan tertinggi; mengatur pemerintahan, menjaga keamanan, dan menjadi hakim tertinggi atas perkara yang tidak selesai di bawahnya
Fetor	Weto	Pembantu utama raja; melaksanakan kebijakan di wilayah keketoran, menyelesaikan perkara, dan bertanggung jawab langsung kepada raja
Temukung	Temugu	Pemimpin tingkat kampung di bawah fetor; mengatur warga, menjaga keamanan, dan melaksanakan kebijakan kerajaan
Masyarakat	Ana Rai	Menaati aturan adat dan perintah pemimpin, serta menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial

Sumber: hasil wawancara dan olahan peneliti.

Di bidang politik, Marthen Heke Ludji menyatakan bahwa kebijakan raja berfokus pada stabilitas pemerintahan dan persatuan wilayah, terutama melalui penyelesaian konflik, pemeliharaan ketertiban, dan hubungan harmonis antarwilayah, bukan pembangunan fisik berskala besar. Ruben Wila Pa menambahkan bahwa raja menyelesaikan sengketa batas wilayah, tetap mempertahankan Mone Ama, Deo, Pulodo, dan pemangku adat lain dalam mengatur masyarakat, dan menjaga hubungan baik dengan Belanda. Hasilnya, pengaruh Seba sebagai pusat pemerintahan dihormati wilayah lain di Sabu.

Kebijakan politik tersebut sesuai dengan konsep pemerintahan Busroh (1989) sebagai sistem kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama, dan dengan gambaran Doko (1973)

tentang raja yang bijaksana, berwibawa, serta menjaga ketertiban. Kepercayaan masyarakat dan pemimpin wilayah menjadi modal utama pelaksanaannya, sebagaimana ditekankan Effendy (1981). Hubungan dengan Belanda dapat dipahami sebagai strategi mempertahankan kedudukan kerajaan di tengah menguatnya pengaruh kolonial. Keseimbangan yang tercipta bersifat terbatas, karena raja memelihara lembaga adat, tetapi jalur pajak dan pengawasan kolonial menegaskan bahwa kedaulatan Seba tidak lagi penuh.

Di bidang keamanan dan pertahanan, Alexander dikenal sebagai penengah dalam sengketa antara Timu, Liae, Mesara, Menia, dan Seba. Perannya mengurangi peperangan yang sebelumnya sering terjadi antarkerajaan dan antarsuku, dan ia dihormati raja-raja wilayah lain karena kemampuannya menyelesaikan perselisihan. Keterangan Marthen Heke Ludji dan Ruben Wila Pa sejalan, dan keduanya menekankan pendekatan musyawarah serta penyelesaian damai, bukan kekuatan senjata. Penelitian ini tidak memperoleh data tentang kekuatan militer kerajaan, sehingga aspek pertahanan dalam arti persenjataan belum dapat diuraikan. Peran raja sebagai pelindung yang menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan wilayah sesuai dengan pendapat Doko (1973), dan penerimaan keputusannya oleh para pemimpin wilayah lain mencerminkan legitimasi tradisional dalam pengertian Weber (1947).

Di bidang ekonomi, Marthen Heke Ludji menegaskan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan. Masyarakat masih mengandalkan pertanian sederhana, peternakan, penyadapan lontar, dan barter. Pemerintah kolonial membangun fasilitas umum seperti jalan, gereja, masjid, mercusuar, dan bangunan pemerintahan sederhana yang mendukung aktivitas masyarakat dan pelayaran, tetapi jalan dibangun terutama melalui kerja rodi yang diorganisasi Belanda. Observasi tidak menemukan peninggalan yang secara langsung menunjukkan kebijakan ekonomi raja. Ruben Wila Pa menyatakan bahwa raja mendorong warga memusatkan perhatian pada pertanian dan pekerjaan produktif daripada konflik antarsuku. Peran ekonomi raja, dengan demikian, bersifat tidak langsung, yaitu menciptakan keamanan agar kegiatan pertanian dan perdagangan berjalan tanpa gangguan. Gotong royong dalam mengolah lahan dan membangun rumah adat turut menopang produktivitas, sebagaimana digambarkan Koentjaraningrat (2009), sedangkan corak agraris dan tradisional perekonomian itu sesuai dengan gagasan Woha (2008) bahwa kehidupan kerajaan dipengaruhi karakter wilayah dan kemampuan warga mengelola sumber dayanya.

Di bidang sosial, raja berupaya menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis dengan bertindak sebagai pemimpin sekaligus penengah. Masyarakat tetap memegang adat dan, ketika wabah menyerang manusia maupun ternak, mengandalkan Mone Ama yang menjalankan ritual adat. Keberadaan Mone Ama, Deo, dan Pulodo dipertahankan karena berperan mengatur aspek sosial dan keagamaan, dan kerja sama lembaga kerajaan dengan lembaga adat membuat berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai. Sistem kekerabatan patrilineal yang disebut udu juga masih menjadi dasar hubungan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan Doko (1973) bahwa pemimpin tradisional adalah pelindung nilai budaya, dengan pandangan Weber (1947) bahwa pemimpin tradisional memperoleh legitimasi dari adat yang dipegang teguh, serta dengan Nara Kaha (2024) yang menemukan bahwa sistem sosial Seba sangat dipengaruhi adat dan kekerabatan patrilineal.

Ringkasan kebijakan per bidang disajikan pada Tabel 4. Jawaban atas rumusan masalah ketiga: pemerintahan Alexander Rihi Jawa menekankan stabilitas politik, penengahan sengketa, keamanan, dan pelestarian adat, sedangkan perekonomian tidak banyak berubah dan hanya tersentuh oleh pembangunan fasilitas serta kerja rodi dari pemerintah kolonial.

Tabel 4. Ringkasan Kebijakan Raja Alexander Rihi Jawa menurut Bidang

Bidang	Bentuk kebijakan dan peran	Catatan
Politik	Menjaga stabilitas dan persatuan wilayah; menyelesaikan sengketa batas; mempertahankan lembaga adat; menjalin hubungan dengan Belanda	Pajak mengalir melalui jenjang raja, fetor, temukung

Bidang	Bentuk kebijakan dan peran	Catatan
Keamanan dan pertahanan	Menengahi sengketa Timu, Liae, Mesara, Menia, dan Seba; mengurangi peperangan	Data kekuatan militer tidak diperoleh
Ekonomi	Menjaga keamanan agar pertanian dan perdagangan berjalan; mendorong kegiatan produktif	Tidak ada perubahan signifikan; fasilitas dan kerja rodi berasal dari Belanda
Sosial	Mempertahankan adat, kekerabatan, serta peran Mone Ama, Deo, dan Pulodo	Ritual adat dipakai saat wabah

Sumber: hasil wawancara dan observasi.

Implikasi Teoretis dan Keterbatasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori legitimasi tradisional Weber (1947) dan konsep pemerintahan adat Doko (1973) untuk Kerajaan Seba, sebab suksesi, upacara pengukuhan, dan pelestarian lembaga adat menunjukkan bahwa adat tetap menjadi sumber kewibawaan raja. Konfirmasi itu perlu dimodifikasi untuk akhir abad ke-19. Adat tidak berdiri sendiri, karena pengakuan Belanda, jalur pajak kolonial, dan perubahan status raja-raja wilayah lain membentuk legitimasi berlapis. Kerajaan tradisional di bawah pengaruh kolonial karenanya lebih tepat dipahami sebagai pemerintahan adat yang beradaptasi, bukan institusi adat yang utuh dan tertutup.

Hasil ini selaras dengan Higa (2023) mengenai wilayah luas dan pemerintahan adat Seba yang bertahan hingga 1963, serta dengan Nara Kaha (2024) mengenai struktur raja, fetor, temukung dan kekerabatan patrilineal. Kesenambungan struktur dari periode sebelum hingga sesudah Alexander tampak konsisten. Penelitian ini menambahkan penjelasan tentang periode di antara keduanya, yakni bahwa kesinambungan tersebut dijaga melalui peran raja sebagai penengah dan pelindung lembaga adat.

Keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan pada tiga informan dan tradisi lisan, tahun-tahun silsilah yang belum lengkap, serta belum digunakannya arsip kolonial yang secara langsung menyebut Alexander. Perluasan sumber berupa arsip, dokumen kerajaan, dan peninggalan material dapat menguji kembali temuan ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Kerajaan Seba berkembang dari wilayah adat Habba menjadi kerajaan setelah Kore Rohi dikukuhkan sebagai raja, dengan pergantian kepemimpinan turun-temurun, wilayah kekuasaan yang mencakup 18 wilayah, pusat di Mebba, dan hubungan awal dengan Belanda sebelum 1890. Kedua, Alexander Rihi Jawa diangkat melalui suksesi garis keturunan dan upacara adat yang melibatkan Mone Ama serta unsur masyarakat, sementara keterangan informan menunjukkan keterlibatan Belanda dalam penetapannya sebagai Raja Sabu. Ketiga, kebijakan pemerintahannya pada 1890–1901 menekankan stabilitas politik, penyelesaian sengketa antarwilayah, keamanan, dan pelestarian lembaga adat, sedangkan ekonomi tetap agraris dan berbasis barter dengan perubahan terbatas akibat pembangunan fasilitas serta kerja rodi kolonial. Kepemimpinan Alexander Rihi Jawa berperan penting menjaga eksistensi Kerajaan Seba dan memperkuat persatuan masyarakat Sabu pada akhir abad ke-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. S. (2006). *Metode penelitian sejarah*. Restu Agung.
- Busroh, H. A. D. (1989). *Sistem pemerintahan Republik Indonesia*. Bina Aksara.
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Doko, J. (1973). *Sejarah pemerintahan tradisional Timor*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Effendy, O. U. (1981). *Dimensi-dimensi komunikasi*. Alumni.
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2014). *Pengantar ilmu sejarah*. Ombak.

- Higa, D. (2023). Sejarah Kerajaan Seba pada masa pemerintahan Raja Lazarus Rohi tahun 1881-1890. *Jurnal Floresiensis*, 2(1).
- Kansil, S. T. (2008). *Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia*. Erlangga.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2009). *Metodologi penelitian*. Rineka Cipta.
- Lohanda, M. (Ed.). (1998). *Inventaris arsip tekstual Arsip Timor (1616-1930)*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Margono, S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Rineka Cipta.
- Nara Kaha, A. D. (2024). *Sejarah Kerajaan Seba pada masa pemerintahan Raja Paulus Charles Jawa tahun 1937-1963* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Satori. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprpto. (2013). *Metodologi penelitian ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial*. Center for Academic Publishing Service.
- Tabala, D. N. M. (2023). *Sejarah Kerajaan Anas pada masa pemerintahan Raja Leu Nesnay I pada tahun 1879-1908* [Naskah jurnal, Universitas Nusa Cendana].
- Tamburaka. (1999). *Pengantar ilmu sejarah: Teori filsafat sejarah dan IPTEK*. Rineka Cipta.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.
- Widiyatmika. (2007). *Lintasan sejarah Bumi Cendana*. Pusat Pengembangan Madrasah NTT.
- Woha. (2008). *Sejarah pemerintahan di Pulau Sumba*. Perum Percetakan Negara.